

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kerjasama antar negara merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian suatu negara karena sebuah negara mungkin tidak dapat mencapai kepentingan nasionalnya tanpa bekerjasama dengan negara lain yang memiliki kelebihan yang tidak dimilikinya.

Demikian pula dengan Indonesia yang saat ini mulai menata diri menjadi sebuah negara yang ingin selalu meningkatkan perekonomiannya. Maka Indonesia harus terus menjalin kerjasama dengan negara lain. Namun kerjasama antar negara bukan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja tapi bisa juga dilakukan oleh organisasi non pemerintah.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia ikut berpartisipasi dalam mengisi pembangunan bangsa dengan kerjasama dengan China sebagai negara yang memiliki kedekatan emosional dengan etnis Tionghoa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul *“Kerjasama Internasional Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan*

B. Tujuan Penulisan

1. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapat gelar S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Penulis bertujuan untuk mengangkat tentang keberadaan suku Tionghoa yang beragama islam pada umumnya karena mereka tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia lainnya karena suku ini terkesan eksklusif dan tidak mau berbaur.
3. Penulis mencoba untuk memaparkan peranan PITI dalam memajukan negara Indonesia dimata internasional.

C. Latar Belakang Masalah

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) merupakan suatu organisasi sosial keagamaan yang berjuang untuk menyebarkan islam di kalangan etnis Tionghoa Indonesia. Namun aktifitas PITI tidak hanya pada kegiatan agama saja namun PITI menyadari bahwa sebagai sebuah organisasi etnis yang cukup kuat, PITI memiliki tanggung jawab tidak hanya berjuang untuk kepentingan kelompoknya sendiri namun juga berjuang untuk mengisi pembangunan Indonesia dengan berbagai kegiatan yang positif.

Dan salah satu cara untuk mengisi pembangunan Indonesia agar dapat mengharumkan Indonesia di mata internasional adalah dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara lain. Kerjasama internasional ini dipilih PITI sebagai langkah untuk memajukan citra dan memajukan Indonesia di mata

negara lain, dimana saat ini Indonesia harus benar-benar menjadi negara yang mampu membina hubungan baik dengan negara lain agar kerjasama tersebut nantinya dapat membawa banyak manfaat yang akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan Indonesia.

Namun selain untuk memajukan Indonesia, PITI melakukan kerjasama internasional ini karena terdapat alasan lain yang sangat signifikan yaitu yang terdapat dalam tubuh PITI sendiri. Hal tersebut telah berlangsung semenjak sebelum kemerdekaan Indonesia, dimana etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi Indonesia hidup saling terpisah dan jauh dari kata harmonis satu sama lain. Hal itu karena politik *Devide et Impera* yang diterapkan oleh Belanda. Belanda telah mengadu domba etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi bahwa etnis Tionghoa itu kelompok yang licik dan curang, sedangkan masyarakat pribumi dikatakan sebagai kelompok yang tidak jujur.

Sulit untuk dibantah bahwa dalam masyarakat Indonesia pada umumnya berkembang sejumlah stereotip negatif tertentu mengenai karakter masyarakat etnis Tionghoa. Charles A. Coppel mengidentifikasi setidaknya terdapat 5 karakter umum etnis Tionghoa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang selama ini tertanam. Bila dibagi Secara umum berikut adalah karakter umum etnis Tionghoa yang berkembang dalam persepsi masyarakat di Indonesia¹ antara lain :

1. Masyarakat etnis Tionghoa cenderung dianggap sebagai sebuah bangsa atau ras yang terpisah yakni bangsa China.

2. Posisi masyarakat etnis Tionghoa yang diuntungkan dalam struktur sosial di bawah pemerintahan kolonial Belanda dilihat sebagai faktor penting yang memungkinkan mereka untuk menjadi kekuatan ekonomi dominan yang kemudian menjadi sumber ketidaksenangan masyarakat asli.
3. Struktur sosial diskriminatif selama penjajahan Belanda dimana mayoritas kalangan etnis Tionghoa lebih suka mengidentifikasi diri dengan bangsa Belanda, juga melahirkan persepsi bahwa etnis Tionghoa memiliki sikap arogan memandang rendah masyarakat Indonesia asli dan cenderung eksklusif serta mempertahankan hubungan “kekerabatan” dengan China daratan.
4. Masyarakat etnis Tionghoa dilihat sebagai kelompok yang tidak mungkin berubah dan akan selalu mempertahankan nilai-nilai kulturalnya dimanapun mereka berada. Hal ini misalnya kerap terlihat dalam ungkapan “sekali China tetap China”.
5. Masyarakat etnis Tionghoa dilihat sebagai kelompok yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri, khususnya kepentingan ekonomi.

Dari latar belakang sejarah itulah maka PITI ingin berusaha untuk menghilangkan pencitraan yang negatif etnis Tionghoa dengan menunjukkan bahwa etnis Tionghoa adalah warga negara Indonesia yang mencintai Indonesia dan ingin mengharumkan Indonesia dimata Internasional.

Setelah kemerdekaan politik dicapai Indonesia (1949), penguasa kolonial Belanda tersingkir dari dunia politik dan digantikan oleh tokoh-tokoh politik atau penguasa Indonesia. Dari latar belakang sejarah yang sangat panjang yang diwariskan oleh etnis Tionghoa Indonesia pada masa kolonial Belanda khususnya

telah menyisakan banyak peristiwa penting yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Karena memang peristiwa yang terjadi pada masa kolonial tersebut telah menciptakan semacam jurang pemisah antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa.

Politik yang telah dilancarkan Belanda untuk memecah belah hubungan antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa selama 350 tahun itu sangatlah kuat pengaruhnya tertanam dalam jiwa kedua golongan masyarakat itu. Hal ini pula yang telah menjadi pondasi yang kuat betapa keberadaan kedua golongan masyarakat tersebut hingga masa kedepan juga menjadi sangatlah tidak harmonis. Apalagi keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sebagai etnis pendatang yang kehadirannya sangat kontroversial dan seringkali mengundang banyak masalah terutama masalah diskriminasi ras.

PITI bukan lahir begitu saja dengan mudah, namun melalui proses yang sangat panjang karena sebagai organisasi islam yang berlandaskan etnis, akan sulit sekali bagi PITI untuk berkembang di tengah masyarakat pribumi yang masih belum bisa menerima keberadaan etnis pendatang. Perlu perjuangan yang sangat keras untuk mencapai tujuan mereka dalam menyamakan hak mereka di dalam negara yang masih belum bisa menerima keberadaan mereka dengan tangan terbuka.

Menilik sejarah panjang sebelum PITI lahir, perjuangan etnis Tionghoa Indonesia penuh dengan masalah yang sangat krusial. Organisasi-organisasi etnis Tionghoa bermunculan dan penuh dengan tragedi. Mereka ingin sekali turut berpartisipasi dalam konsep politik setempat untuk melindungi kepentingan

mereka. Berikut adalah sedikit penggambaran dimana kehidupan berpolitik etnis Tionghoa bisa dilihat perbedaannya pada masa orde lama, orde baru, dan masa Reformasi.

1. Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Soekarno terdapat dua jenis partisipasi politik bagi etnis Tionghoa yang merupakan kebijakan dari Soekarno. Kedua jenis Partisipasi Politik tersebut yaitu: Partisipasi Formal melalui partai politik. Dalam partisipasi Formal digolongkan dalam 3 pola yaitu :

- a . Dengan mendirikan parpol etnis Tionghoa.
- b. Melalui partisipasi dalam partai berasimilasi.
- c. Melalui partai multietnis.

1. Partisipasi Informal melalui organisasi nonpolitik atau kelompok penekan.

Jumlah etnis Tionghoa di Indonesia pada saat itu hanya 2,8 % dari total populasi dan jelas mereka merupakan golongan minoritas. Namun mereka tidaklah homogen. Secara kultural dan dinilai dari pandangan partisipasi politik mere Etnis Tionghoa Peranakan : etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia dan berbahasa Indonesia. Peranakan lebih tertarik pada politik Indonesia. Ketika merdeka pada tahun 1945, mereka membentuk berbagai macam organisasi untuk melindungi kepentingan mereka. Misalnya :

a. **Peratuan Tenaga Bani (Union Of Indonesian Etnos)** pada tahun 1950

- b. Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) merupakan asosiasi utama orang Tionghoa pada masa awal setelah perang dunia II. Partai ini didirikan pada tahun 1948.
- c. BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)² didirikan pada tahun 1954 ketika pertama kali di Indonesia diselenggarakan Pemilu, pada saat itu berbagai partai etnis Tionghoa (termasuk PDTI) bertekad membentuk organisasi baru. Adapun Program kerja BAPERKI antara lain;
 - a) Mendirikan sekolah berbahasa Indonesia untuk anak-anak etnis Tionghoa peranakan
 - b) Ikut Berpartisipasi dalam pemilu
 - c) Menjadikan BAPERKI sebagai Asosiasi Tionghoa Indonesia terbesar sebelum kup 1965
 - d) Mendirikan sebuah Universitas peranakan yang besar di Jakarta.

Tokoh paling utama di BAPERKI adalah Siauw Giok Tjhan (1914-1981) dan Yap Thiam Hien (1913-1989)³. Siauw adalah wartawan yang menerima pendidikan lanjutan di Belanda. Namun di Indonesia, ia dipengaruhi gerakan sayap kiri dan dicurigai sebagai salah seorang anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dilarang sebelum PD II. Setelah perang, ia memegang jabatan direktur Harian Rakyat sebelum diambil alih secara resmi oleh PKI. Ia yakin dengan apa yang disebut masalah China hanya dapat dipecahkan setelah terwujudnya "Masyarakat Sosialis".

² Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China : A Study of Perceptions and Politics*, Edisi Ketiga (Singapura dan Kuala Lumpur), Hienemann Asia, Hal 65-70

Sedangkan Yap adalah seorang penganut Kristen. Yang taat dan tidak menyetujui solusi sosialis Siauw. Ia bekerja sebagai pengacara dan ia juga aktif dalam kegiatan gereja dan dalam gerakan HAM. Ia menentang pemerintahan otoriter, karenanya ia sangat kritis terhadap PKI. Tapi keduanya baik Siauw dan Yap menginginkan pluralisme budaya dan agar etnis Tionghoa Indonesia memiliki identitas.

Seiring berjalannya waktu, BAPERKI didominasi oleh kelompok sayap kiri yang dipimpin Siauw dan berhasil menggeser Yap, kemudian BAPERKI sangat dekat dengan PKI dan presiden Soekarno.

2 Etnis Tionghoa Totok : Etnis Tionghoa yang berbahasa China dan umumnya lahir di China. Etnis Tionghoa Totok dipengaruhi oleh situasi politik di China. Dan mereka juga lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan politik China dari pada di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan partisipasi mereka dalam politik Indonesia sangat minim.

2. Masa Orde Baru

Gagalnya kup 1965 yang ditandai dengan jatuhnya Soekarno menyebabkan PKI dilarang dan menyebabkan BAPERKI juga dilarang oleh pemerintahan Soeharto karena keterlibatannya dengan kup 1965. Hal ini menimbulkan kekerasan anti China Indonesia karena orang Tionghoa dituduh membantu PKI dan BAPERKI.

Setelah gagalnya kup 1965 dan dibubarkannya partai komunis, pemerintah terutama militer Indonesia terkenal sangat anti komunis. Elita yang berkuasa di

Indonesia mencurigai China dan Khawatir bahwa RRC dapat memanfaatkan etnis Tionghoa yang meliputi 2,8 % penduduk Indonesia saat itu untuk membantu kepentingan nasional China.

Terbukti Dalam kunjungannya ke Malaysia dan Thailand pada akhir tahun 1978 Deng Xiao Ping menolak untuk memisahkan Partai Komunis China (PKC) dengan partai-partai komunis di Asia Tenggara.⁴ RRC enggan menarik dukungannya terhadap gerakan komunis internasional karena RRC takut langkah ini akan mendorong gerakan ini jatuh ke tangan Uni soviet dan Vietnam. Selain masalah komunis, para pejabat Indonesia secara pribadi mengeluh bahwa RRC terus membantu Fretelin di Timor-timur dan hal ini yang merisaukan pemerintah Indonesia⁵.

Karna inilah untuk beberapa lama setelah kup 1965, hampir tidak ada partisipasi politik etnis Tionghoa dalam skala besar. Bahkan Orde Baru menandai berakhirnya organisasi politik dan sosial budaya berdasarkan etnis di Indonesia.

Kemudian Presiden Soeharto memperkenalkan Pendekatan "Politik Berintegrasi" secara perorangan bukan berdasarkan kelompok etnis. Etnis Tionghoa yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui patai politik pribumi, yaitu GOLKAR, PPP, dan PDI.

Etnis Tionghoa tidk dapat bergabung mendirikan partainya berdasarkan komunitas mereka sendiri.

Selain parpol formal, dapat pula melalui jalur dimana kepentingan etnis Tionghoa dapat diartikulasikan yaitu melalui beberapa Institusi Pemerintah yaitu

⁴ *Strait Times*, 11 November 1998

⁵ *Strait times*, New Nation , 14 januari 1980

BAKOM (Badan Komunikasi) yang dibentuk pemerintah tahun 1977. Fungsinya sebagai badan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Badan ini berada di bawah naungan Menteri Dalam Negeri terus menganjurkan asimilasi etnis Tionghoa. Selain itu juga terdapat Pusat Study Strategis dan Internasional (CSIS) sebuah institusi penelitian swasta yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah sering digunakan untuk menyalurkan aspirasi etnis Tionghoa.

Selain melalui Parpol Formal Pribumi dan Institusi Pemerintah juga etnis Tionghoa dapat menyalurkan aspirasinya melalui Organisasi lain yang digunakan Tionghoa sebagai kelompok penekan yaitu Prasetya Mulya (yang mengandung arti Janji Mulia) didirikan tahun 1980. Merupakan sebuah yayasan yang bertujuan membantu pemerintah melaksanakan program sosial. Kemudian juga membentuk institut manajemen yang bertujuan melatih para manajer Indonesia⁷.

Sebagai orang Jawa tradisional, Soeharto yakin bahwa etnis Tionghoa adalah pedagang dan harus dibatasi pada bidang itu saja. Mereka seharusnya tetap menekuni profesi mereka di bidang ekonomi dan tidak seharusnya berpindah ke bidang lain. Tidaklah mengherankan jika Soeharto enggan mengangkat orang Tionghoa manapun untuk menduduki posisi penting dalam bidang politik.

Pada dasarnya hal ini memperlihatkan pemerintah enggan untuk menjadikan etnis Tionghoa sebagai figur politik. Mungkin hal itu disebabkan oleh Prasangka elit pribumi bahwa Tionghoa Indonesia lebih China dari pada Indonesia dan Orang Tionghoa masih merupakan sasaran serangan golongan minoritas. Maka kebijakan yang ingin diterapkan Soeharto adalah Lebih aman

Yang menjadi latar belakang dalam Hubungan Kerjasama Internasional PTTI dengan China adalah Pertama, Hubungan Indonesia dengan China selalu mengalami jatuh bangun. Dua Negara tersebut merupakan Negara yang selalu membina hubungan baik, namun hubungan ini tidak selalu harmonis akan tetapi terkadang terjadi beberapa konflik baik dalam pemerintahan maupun antara warga negara kedua negara masing-masing.

Indonesia sangat memerlukan mitra seperti China mengingat saat ini China adalah Negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat saat ini. Maka, Indonesia seharusnya mengikuti langkah China untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam memperbaiki hubungan dengan China itu bisa dilakukan dengan berbagai hal salah satunya adalah dengan kerjasama.

Kerjasama antara Indonesia dengan China tidak harus dilakukan oleh pemerintahnya saja, namun dapat juga oleh organisasi non pemerintah, swasta maupun individu. Salah satunya adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PTTI) yang melakukan hubungan kerjasama dengan China.

PTTI sebagai suatu organisasi sosial keagamaan yaitu organisasi muslim Tionghoa mengemban misi untuk membina hubungan baik antara Indonesia dengan China yang nantinya akan memperbaiki citra Indonesia dimata China khususnya dan dunia internasional pada umumnya.

Kemudian dalam Perkembangannya pula terdapat kenyataan bahwa Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan politik untuk menyebarkan hubungan budaya yang dimiliki oleh Indonesia ke negara-negara tetangga dengan

perkembangan zaman yang senantiasa berubah cepat dan idealnya juga ikut mewarnai dengan karya-karya yang nyata yang berguna bagi bangsa dan negara.

Keberadaan muslim Tionghoa yang ada dalam PITI ini pertanda makin menyatukan solidaritas persatuan dan kesatuan putra-putri bangsa. Jadi dari sinilah peran PITI dapat dijadikan suatu peluang untuk berbakti kepada bangsa dan negara serta agama dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

PITI bertambah penting peranannya saat ini adalah karena terjadinya perubahan politik yakni bergantinya orde baru dan munculnya era reformasi. Perubahan ini lebih mendorong perubahan sikap etnis Tionghoa kearah yang lebih terbuka.

Pada level nasional PITI memiliki niat untuk bergerak secara riil di masyarakat. Pertama, melaksanakan dakwah islamiyah dan amar ma'ruf nahyi munkar, untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menyelenggarakan pendidikan, pengembangan dan pengajaran kebudayaan yang sesuai dengan ajaran islam. Ketiga, menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lain guna meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan ukhuwah islamiyah.

Sedangkan pada level Internasional, PITI melaksanakan beberapa program kerja internasional di beberapa bidang seperti pada Bidang Pariwisata, kebudayaan dan Seni, Kesehatan, Pendidikan, dan Agama dengan beberapa negara khususnya China. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengangkat citra

PITI di masa ke depan akan dapat lebih berperan aktif dan maju terus demi kepentingan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan umat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yaitu "Apakah manfaat dari Kerjasama Internasional Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan China bagi Indonesia?"

E. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi Kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan segala aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam percaturan masyarakat internasional. Juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa¹⁰.

Diplomasi Kebudayaan adalah teknik pemanfaatan dimensi kebudayaan dalam percaturan hubungan antar bangsa¹¹. Yang dimaksud dengan diplomasi disini adalah segala macam upaya Politik Luar Negeri suatu bangsa dan bukan sekedar berarti perundingan saja¹². Sedangkan yang dimaksud kebudayaan disini

¹⁰ Alfian dan Nazaruddin Sjamsudin, "Profil Budaya Politik Indonesia", Grafiti, Jakarta, 1991 Hal 292

¹¹ Charles O Lherce Jr dan Abdul A Said, "Concept of International Politic", Prentice Hall Inc, New Jersey, 1964 Hal 86-87

¹² Dan S. J. Diplomasi, Rajawali Press, Jakarta, 1991

adalah dalam pengertian makro yakni segala upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya.

Adapun Diplomasi Kebudayaan itu sendiri pada konsepnya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Non Pemerintah, kelompok organisasi, Individu, atau setiap warga negara. Oleh karena itu pola hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa bisa terjadi antara pemerintah – pemerintah, pemerintah – swasta, swasta – swasta, pribadi – pribadi, pemerintah – pribadi, dan seterusnya. Pola hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa bisa terjadi antar siapa saja sebagai aktor Diplomasi Kebudayaan, dimana tujuan dan sasaran utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum, baik pada level nasional maupun internasional. Isi diplomasi kebudayaan adalah sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam Politik Luar Negeri) yaitu kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi, sampai dengan pertukaran ahli dan lain sebagainya¹³.

Sasaran dari Diplomasi Kebudayaan adalah terutama pendapat umum baik dalam level nasional (masyarakat suatu bangsa) maupun level Internasional. Oleh karena itu sasaran utamanya adalah masyarakat luas tidak sekedar pemerintahnya saja, dengan harapan pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada pemerintah atau Organisasi Internasional. Sedangkan sarana Diplomasi Kebudayaan adalah segala alat komunikasi baik media elektronik maupun media cetak dan semua Sumber Daya Manusia yang dianggap dapat menyampaikan Isi dan Misi Politik Luar Negeri tersebut termasuk

¹³ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi bagi Masyarakat Danabawakomus : Studi Kasus Indonesia Crikab Yogyakarta 2007* Hal 4 - 5

didalamnya sarana diplomatik dan militer. Tujuan umum dari Diplomasi Kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan Politik Luar Negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan Diplomasi Kebudayaan adalah antara masyarakat suatu negara tertentu dengan masyarakat negara lain. Pendapat umum yang dimaksud guna mempengaruhi kebijakan pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan¹⁴.

Dari konsep diplomasi kebudayaan yang telah di uraikan di atas maka di kaitkan dalam masalah yang dijelaskan maka PITI sebagai salah satu aktor diplomasi kebudayaan yaitu kolektif non pemerintah dimana PITI mempunyai agenda baik untuk level nasional maupun internasional. Dimana tujuannya untuk mengangkat citra etnis Tionghoa muslim Indonesia. PITI mempunyai peranan penting bagi pengembangan Diplomasi Kebudayaan dengan agenda tersebut yang nantinya akan diakui oleh dunia Internasional.

Jadi Program Kerja Internasional PITI dikatakan sebagai konsep Diplomasi Kebudayaan dimana PITI mempunyai konsep yang jelas yaitu memanfaatkan aspek kebudayaan seperti membangun Masjid khas arsitektur Tiongkok yaitu Masjid Cheng Hoo. PITI sebagai wadah etnis Tionghoa muslim dengan konsep Diplomasi Kebudayaan ini bertujuan mempengaruhi pendapat umum baik dalam level nasional maupun Internasional yaitu PITI ingin agar etnis Tionghoa tidak lagi didiskriminasikan dan agar dikotomi Islam-Tionghoa dihapuskan dari benak masyarakat Indonesia.

¹⁴ *Ibid*

Sedangkan pada level Internasional PITI bertujuan mempengaruhi pendapat umum masyarakat Internasional khususnya China dengan cara PITI memperkenalkan budaya Indonesia agar dapat lebih menarik negara lain juga agar masyarakat Internasional mengakui keberadaan muslim Tionghoa yang telah ikut berperan dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan seiring berjalannya kemajuan teknologi informasi, maka mudah bagi PITI untuk “Go Internasional” Masyarakat Internasional diberbagai penjuru bisa mengetahui melalui berbagai media baik cetak seperti bulletin “Komunitas”, media elektronik seperti televisi bahkan melalui jaringan internet.

Dengan demikian seluruh dunia dapat mengikuti perkembangan PITI. Hal ini berarti Indonesia dapat memanfaatkan PITI sebagai media atau sarana diplomasi kebudayaan yang efektif untuk memperlihatkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya tersebut kepada masyarakat internasional.

PITI dalam usaha untuk mewujudkan Diplomasi Kebudayaan bagi Indonesia, salah satunya dilakukan dengan membangun Masjid Cheng Hoo. Pembangunan Masjid Cheng Hoo ini bukan semata-mata untuk tempat peribadatan saja, melainkan terdapat misi tersendiri bagi warga PITI. Masjid Cheng Hoo merupakan tempat untuk mempersatukan muslim Tionghoa di Indonesia dalam berbagai agenda untuk menyebarkan agama islam di kalangan etnis Tionghoa Indonesia.

Dalam perkembangannya, keunikan yang terdapat pada bangunan Masjid

hubungan dengan Negara lain secara profesional. Memahami dasar-dasar teori organisasi, desain organisasi, struktur organisasi dan perilaku organisasi. Pengetahuan Hubungan Masyarakat dan Internasional Memahami tentang pentingnya menjalin kemitraan dengan pihak luar baik dalam maupun luar negeri.

Dr. Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan pernyataan berikut :

”Sikap kooperatif dalam menyelenggarakan Politik Luar Negeri senantiasa dapat dikembalikan pada asumsi bahwa persoalan tertentu tidak dapat diatasi atau sasaran tertentu tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Sikap kooperatif juga dapat bangkit bila ada perkiraan bahwa kerjasama akan membawa dampak yang menguntungkan bila hanya dibandingkan dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri”.

Tetapi pada umumnya juga disadari bahwa kerjasama international senantiasa membawa konsekuensi tertentu. Namun demikian suatu kerjasama senantiasa diusahakan justru karena manfaat yang diperoleh secara proporsional adalah masih lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggung¹⁶.

Akar-akar dan kerjasama dalam organisasi internasional terletak pada kesadaran terhadap adanya kepentingan bersama dan tujuan yang telah disepakati, dimana masing-masing hak yang bersangkutan percaya akan mendapat keuntungan yang lebih baik dengan memiliki organisasi atau mekanisme dari pada bila tidak melakukan kerjasama karena hampir semua memerlukan seorang mitra dalam beraliansi.

¹⁶ B. Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional: Konsep, Studi Analisis, Dan*

Dengan pengertian konsep kerjasama internasional tersebut maka dikaitkan dengan PITI adalah kerjasama internasional menjadi bagian agenda PITI karena persoalan tertentu tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan sikap kooperatif antara PITI dengan China bangkit karena telah diperkirakan PITI bahwa kerjasama ini akan membawa dampak yang menguntungkan bila dibandingkan dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri.

Sasaran yang dimaksud yang tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri adalah pertama dari sisi PITI sendiri yaitu citra etnis Tionghoa yang kurang bagus yaitu terkesan eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat pribumi dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini yang selama ini tertanam dalam benak pribumi Indonesia. Jadi, dengan adanya kerjasama antara PITI dengan pemerintahan China tentu saja akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Maka pencitraan yang tersebut diatas tentu akan mengikis dan hilang dengan sendirinya. Kedua, sasaran lain adalah bahwa dengan kerjasama dengan China maka akan memperbaiki beberapa sektor penting di Indonesia yaitu sektor Pariwisata, Seni Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Agama.

Menurut K.J.Holsti menyatakan bahwa "Sebagai transaksi dan interaksi diantara Negara-negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional atau global yang memerlukan perhatian dari banyak Negara. Dalam banyak kasus sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan menandatangani perjanjian dengan perjanjian atau

pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut Kolaborasi atau Kerjasama¹⁷.

Istilah Kolaborasi atau Kerjasama dapat menimbulkan satu citra akan organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain.

Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antar Negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi dan otonomi wilayah serta yang penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya¹⁸.

Hal ini dilakukan oleh suatu Negara guna memenuhi kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu Negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu Negara¹⁹.

Dari pengertian diatas berkaitan dengan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh PITI dan pemerintah China dalam memperbaiki hubungan Indonesia-China mengingat sebagai bagian dari warga Negara Indonesia sudah sepantasnya PITI berkewajiban membela Negara Indonesia dengan memperbaiki citra negaranya di mata Negara lain khususnya China. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh kedua belah pihak seperti kerjasama dalam bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesenian, Kesehatan dan Agama.

¹⁷ K.J.Holsti, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis Jilid Kedua*, Erlangga, Jakarta, 1983 Hal 209

¹⁸ Theodore.A. Coulombis dan James Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*, Abardin, Bandung, , 1990 Hal 89

¹⁹ *Encyclopedia of International Relations*, Jakarta, 1980

Proses kerjasama itu terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam hidup bermasyarakat, tidak bias terlepas antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjadi inilah yang biasa disebut dengan interaksi. Interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis antara orang-perorangan, antar kelompok manusia maupun antar kelompok manusia dengan orang-perorangan.

Dalam era globalisasi, frekuensi interaksi antara Negara-negara menjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesenian, Kesehatan dan Agama. Kerjasama antar Negara dapat meningkatkan hubungan Negara di dunia internasional menjadi semakin harmonis.

F. Hipotesa

Manfaat Kerjasama Internasional PITI dengan China bagi Indonesia antara lain mempererat hubungan diplomasi antara Indonesia dan China, juga meningkatkan pendapatan negara Indonesia.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengangkat keberadaan PITI di nusantara. Adapun jangkauan penelitian yang penulis angkat adalah dari tahun 2001 sejak dibangunnya masjid Cheng Hoo hingga tahun 2007. karena menurut penulis, pada rentang waktu tersebut banyak sekali yang terjadi pada

H. Tehnik Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah, surat kabar, internet serta informasi-informasi yang penulis dapatkan dari interview pihak-pihak yang terkait. Kemudian data yang diperoleh, nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan. Nusantara.

Selain itu penulis memfokuskan penelitian ini terhadap salah satu Buletin Khusus yang diterbitkan oleh PITI Jawa Timur. Bulletin tersebut diberi nama bulletin 'Komunitas' yang terbit setiap dua bulan sekali. Dalam bulletin tersebut termuat segala macam aktifitas Tionghoa, dan termuat banyak sekali informasi baik kegiatan PITI sendiri maupun etnis Tionghoa Indonesia dan hubungannya dengan China.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada bab ini, dijelaskan mengenai gambaran umum, maksud dan tujuan dan hasil yang akan dicapai dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini memuat tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tehnik penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai dinamika perkembangan

BAB III : Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai bentuk Kerjasama antara PITI dengan pemerintah China

BAB IV ; Pada bab ini, penulis memaparkan manfaat Kerjasama Internasional PITI dengan China bagi Indonesia.

BAB V : Pada bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya